

LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHAP II

**MODEL BAURAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED MIX MODEL*)
DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KOPERASI
RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN WONOGIRI
(Sebuah Upaya Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)**

- 2. Bidang Ilmu Penelitian
- 3. Ketua Penulis
- a. Nama Lengkap
- b. Jenis Kelamin
- c. NIK
- d. Jabatan Fungsional/Oris
- e. Jabatan Akademik
- f. Bidang Ilmu
- g. Fakultas / Jurusan
- h. Perguruan Tinggi
- i. Tam Pengisi



Nr	Nama	Alokasi Waktu
		Jumlah Hari
1.	Dr. H. Moh. Ali Shahab, SE, M.Si	3

- 3. Pendanaan Penelitian
- a. Jumlah rekaeu penelitian
- b. Biaya total yang disetujui
- c. Biaya yang diakui Tahun 2012

Oleh: Semarang, 18 Juli 2013

Hendar (Ketua)
Moh. Ali Shahab (Anggota)

**LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU (LPPI)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
JULI 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : MODEL BAURAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED MIX MODEL*) DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KOPERASI RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN WONOGIRI (Sebuah Upaya Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)
2. Bidang Ilmu Penelitian : Ekonomi
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Hendar, SE, MSi
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIK : 210499041
 - d. Jabatan Fungsional/Gol : Lektor Kepala / IV A
 - e. Jabatan Akademik : -
 - f. Bidang Ilmu : Ekonomi
 - g. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Manajemen
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang
 - i. Tim Peneliti :

No	Nama	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu	
				Jam/Mgu	Bulan
1	Dr. H. Moh. Ali Shahab, SE, M.Si	Kewirausahaan	UISSULA	8	8

3. Pendanaan Penelitian :
- a. Jangka waktu penelitian : 2 (dua) tahun
 - b. Biaya total yang diusulkan : Rp 96.39900,00
 - c. Biaya yang disetujui Tahun 2012 : Rp 39.500.000,00

Semarang, 18 Juli 2013

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi



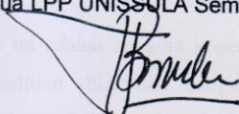
Dr. H. Indri Kartika, MSi, Akt
NIK: 2114090002

Ketua Penelitian



Hendar, SE, MSi
NIK. 210499041

Menyetujui,
Ketua LPP UNISSULA Semarang



Dr. Budhi Cahyono, SE, M.Si
NIK. 210492030

BAB I PENDAHULUAN

ABSTRAK

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah sebuah model pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) yang memiliki kinerja unggul dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin pedesaan secara massif dapat dicapai. Berdasarkan fenomena riset tahap I yang menunjukkan peran dominan strategi pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran dalam meningkatkan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT), maka perlu juga diketahui bagaimana pengaruh model praktek pelaksanaan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga terhadap kinerja koperasi RT. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan pengurus koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri yang tersebar di 25 wilayah kecamatan dengan sampel sebanyak 200 orang yang diambil secara assidental. Penelitian tahap II ini menggunakan pendekatan inferensial untuk mengetahui keterkaitan praktek strategi peningkatan peran dan fungsi terhadap kinerja koperasi. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian Model adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan two step approach. Data diperoleh dengan menggunakan kuestioner dan interview kepada anggota dan pengurus, dan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan koperasi.

Kata Kunci : Bauran terintegrasi, kinerja pemberdayaan, kinerja koperasi, Koperasi RT.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasar pada semangat UUD 1945 Pasal 33, pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan sebuah keniscayaan. Mengingat koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sejiwa dengan semangat konstitusi tersebut, sudah sepatutnya koperasi dijadikan motor pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anggota-anggota koperasi. Di sinilah kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tanggungjawab kelembagaan koperasi, artinya koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat yang perlu diberdayakan agar cita-cita bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Bagi Indonesia, gerakan koperasi berorientasi pada pemberdayaan para anggota dalam kepemilikan aset produksi ekonomi. Produksi ekonomi yang dikerjakan, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi Indonesia lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bukan keuntungan orang seorang. Bersandar dari karakteristik di atas, pembangunan koperasi Indonesia semestinya dibangun dari kesadaran untuk melakukan usaha bersama dalam koperasi dari masing-masing anggota, yakni melalui dinamisasi dan partisipasi aktif anggota dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri.

Partisipasi merupakan roh pemberdayaan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009). Partisipasi memberikan manfaat terhadap pemilihan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi, kualitas rasa kepemilikan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dapat terjaga. Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat juga merupakan pengakuan terhadap eksistensi individu dan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan atas pembangunan (Plummer, 2000). Salah satu program pemberdayaan yang dengan jelas mengadopsi partisipasi masyarakat adalah pembentukan koperasi Rukun Tetangga (RT).

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan ruang (kewenangan) pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing (Tim Crescent, 2003). Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan gerakan koperasi melalui pendekatan kewilayahan setingkat Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro

dalam lingkup rukun tetangga (RT). Gerakan ini bermaksud mendorong masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang sama akan mudah terdorong membentuk usaha swadaya masyarakat. Program ini kemudian dinamakan "Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri". Pengelolaan koperasi RT dengan manajemen baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi RT juga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Koperasi RT tersebut bisa menjadi pemangku kebijakan ekonomi tingkat desa dan diharapkan juga berperan aktif dalam pembangunan.

Gerakan pendirian Koperasi RT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui memanfaatkan potensi kegiatan ekonomi yang ada pada komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan dan penyeragaman struktur kelembagaan Koperasi RT di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa program masih berdasarkan pada pendekatan "*top down*" yang menyimpang dari semangat koperasi yang bersifat "*bottom up*".

Struktur kelembagaan Koperasi RT yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pada masyarakat melalui kelembagaan sosial Rukun Tetangga (RT), tidak secara otomatis dapat diikuti dengan perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki dalam kehidupan berkoperasi. Hal ini tidak lepas dari adanya kaitan antara kelembagaan Koperasi RT dengan struktur dan nilai-nilai yang ada dalam kelembagaan Rukun Tetangga (RT), yaitu kelembagaan sosial yang memiliki peran menjalankan fungsi pemerintahan.

Sampai saat ini memperdayakan koperasi masih diperlukan mengingat banyak koperasi yang belum mandiri. Pemberdayaan ini menuntut sedikit perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi pada beberapa kemudahan dan fasilitasi permodalan usaha, sistem pembinaan manajemen usaha, pelatihan dan peningkatan skill, ketersediaan bahan baku dan penunjang lain guna kelangsungan produktivitas usaha. Juga mengenai jaringan distribusi dan pemasaran hasil usaha, mengingat di era persaingan terbuka saat ini penentuan harga tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada pasar, terlebih lagi jika barang tersebut menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pada beberapa negara, termasuk diantaranya di Afrika Selatan, pemerintah ikut serta dalam mendorong pembangunan koperasi. Undang-Undang Koperasi No 14 tahun 2005 dibuat untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan koperasi di Afrika Selatan dan

menggunakan UU ini sebagai kendaraan untuk mengembangkan usaha kecil. Model koperasi ini diadopsi karena dianggap sebagai prakondisi untuk dukungan pemerintah. Semua koperasi dipelajari masalah institusionalnya dan masalah ini telah diatasi dengan mencurahkan anggota mereka yang miskin dan menciptakan peraturan mereka sendiri untuk menghargai investor dengan capital gain. Namun demikian, *pertama*, solusi ini tidak konsisten dengan tujuan pembangunan ekonomi yang pro-masyarakat miskin dan *kedua* adalah bertentangan dengan Undang-undang yang baru. Oleh karena itu, P Nganwa, M Lyne & S Ferrer, (2010) menyarankan bahwa UU baru harus diubah, sehingga koperasi setidaknya mendapat manfaat dari kepemilikan saham ekuitas yang diperdagangkan sebanding dengan kepemilikan saham investor. Selain itu, dianjurkan bahwa dukungan awal pemerintah harus tersedia untuk semua kelompok produsen yang secara resmi mendaftarkan bisnis mereka, terlepas dari model bisnis yang dipilih, dan bahwa pemberdayaan anggota harus menjadi persyaratan penting untuk pendaftaran dan pendanaan publik

Pada dasarnya terdapat dua alasan perlunya pemerintah membantu pengembangan koperasi. *Pertama*, berdasar pertimbangan non ekonomi bahwa koperasi itu memang harus ada karena sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945 meskipun organisasi ini kurang menguntungkan dibanding perusahaan non koperasi. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab dalam mengembangkan gerakan koperasi meskipun sampai saat ini peran organisasi koperasi masih tertinggal jauh dari BUMN dan BUMS. *Kedua*, berdasar pertimbangan ekonomis, dalam kondisi khusus koperasi mempunyai potensi dan mempunyai kelebihan khusus dibanding para pesaingnya. Potensi ini tidak akan menjadi kenyataan bila koperasi tidak mampu mewujudkan manfaat yang diharapkan para anggotanya. Oleh karena itu dukungan pemerintah terutama dalam bentuk permodalan, sarana dan prasarana fisik, serta kelembagaan diperlukan untuk menyetarakan kedudukan koperasi dalam persaingan (Hendar, 2010).

Sejak dimulainya pola pembangunan ekonomi di Indonesia berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan dalam rangka menunjang perkembangan perkoperasian. Program pembangunan pemerintah yang tepat seperti pembangunan daerah pedesaan dan pertanian atau program untuk kepentingan kelompok-kelompok sasaran tertentu memang dapat dilaksanakan oleh koperasi secara otonom dan atas dasar sukarela (Hanel, 1983). Koperasi-koperasi dilibatkan dalam pelaksanaan berbagai proyek dan program untuk penyaluran kredit-kredit pertanian (KUT), pengadaan sarana produksi, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, dan lain-lain, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Program ini ternyata

tidak sepenuhnya berhasil dengan baik. Pada sekitar tahun 70-an pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui gerakan koperasi mendapat kritik terutama karena gerakan koperasi kenyataannya tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mengubah struktur kekuasaan sosial politik bagi golongan masyarakat miskin (Hanel, 1983).

Sulit dibantah, bahwa relitas kemiskinan adalah bukti nyata gagalnya sebuah pembangunan. Meskipun dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi (Wignyo Adiyoso, 2009). Pada tahun 1997 masalah kemiskinan semakin parah sebagai dampak terkenanya krisis ekonomi. Antara tahun 1996 sampai 1999 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 18% menjadi 24% (Bappenas dan UNDP, 2001). Tahun 2006, Bank Dunia melaporkan bahwa setengah jumlah penduduk Indonesia bisa dikategorikan sebagai penduduk miskin (Hadar, 2006). Pada tahun 2009, 14 % jumlah penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Data tersebut menunjukkan penduduk miskin hanya berkurang 2,43 jiwa dibanding tahun 2008 yang mencapai 15% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2009).

Menurut Disperindagkop UMKM dan Pandal (2011), booming koperasi sebenarnya terjadi tahun 2008, karena pada saat itu ada program bantuan kredit usaha tani (KUT). Setelah KUT berlalu, keberadaan koperasi banyak yang tidak terurus. Saat ini jumlah koperasi di Kab. Wonogiri sebanyak 7.695 buah dan terdiri dari 6.712 koperasi rukun tetangga (RT) dan sisanya 783 Koperasi Umum (KPN, KUD dan Koperasi Simpan Pinjam). Dari jumlah sebanyak itu sekitar 16,67% masih dinyatakan tidak sehat. Khusus untuk koperasi umum, sekitar 53,5 % dari jumlah koperasi umum di Kab. Wonogiri tidak aktif. Ketidakaktifan bisa diukur dari ketiadaan menggelar rapat anggota tahunan, bahkan banyak diantaranya tidak berpapan nama.

1.2 Tujuan Khusus

Koperasi memiliki peran yang besar dalam memajukan ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Kemajuan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi lembaga ini terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi di Indonesia umumnya dan Kab. Wonogiri khususnya. Hingga saat ini peran koperasi masih sangat rendah (kurang dari 5% terhadap PDRB) dan memiliki daya saing yang rendah pula, sehingga koperasi sulit bersaing dengan usaha-usaha lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap serta mencari tahu bagaimana strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri baik yang dilakukan dari pihak eksternal (Pemerintah Daerah maupun instansi terkait) dan pihak internal koperasi itu sendiri. Penelitian ini akan menggambarkan serta mengeksplorasi faktor-faktor penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan strategi tersebut dilihat dari faktor eksternal maupun internal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Secara rinci uraian tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan / kegagalan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Menggambarkan model strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Menggambarkan model pengembangan perangkat sistem IT dan mekanisme kerja koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri.
4. Menggambarkan model integrasi vertikal pengembangan koperasi rukun tetangga (RT) melalui pembentukan pusat-pusat koperasi.
5. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, pengurus koperasi beserta anggota, dan masyarakat pada umumnya mengenai hasil penelitian ini sebagai dasar penyelenggaraan atau pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal : (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya, (b) mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, dan (d) mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No 25 Tahun 1992).

Banyak kalangan yang menganggap koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Anggapan ini harus dibuktikan secara riil agar koperasi tidak lagi menjadi anak nomor tiga setelah BUMN dan BUMS. Peranan kedua badan usaha tersebut terhadap

perekonomian jauh lebih besar dibanding koperasi. Koperasi hanya akan terlihat berperan lebih besar apabila mampu membuktikan kontribusi yang terus meningkat dalam menyerap tenaga kerja dan dalam peningkatan pendapatan nasional. Sementara ini, koperasi hanya mampu memberikan kontribusi yang kurang dari 5 persen terhadap PDB. Tentu saja hal ini sangat jauh dari yang diharapkan. Kenyataan ini menunjukkan organisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia masih dalam bentuk ideologi dan belum mampu membuktikan peran yang seharusnya diemban. Oleh karena itu, berbagai strategi pengembangan diperlukan untuk mendorong peningkatan peran dan fungsi koperasi dalam pembangunan.

Peran pemerintah menjadi dominan dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi saat ini. Dalam UU No 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa, dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, pemerintah (a) memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, (b) meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, (c) mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dengan badan usaha lainnya, dan (d) membudayakan koperasi dalam masyarakat. Kemudian dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah (a) membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya, (b) mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian, (c) memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, (d) membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antarkoperasi, dan (e) memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dengan manajemen baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi RT juga bisa untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karenanya, pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Instansi terkait, perguruan tinggi, dan perbankan, berkewajiban memberi pembinaan dan kredit agar koperasi tersebut bisa berkembang. Peran mereka saat ini sangat dibutuhkan mengingat masih adanya berbagai permasalahan internal koperasi seperti masalah keterbatasan modal usaha beserta manajemen pengelolaannya, keterbatasan kemampuan dalam memasarkan produk hasil usaha anggota, keterbatasan kemampuan SDM

(anggota dan karyawan koperasi) dalam mengelola koperasi, keterbatasan dalam penguasaan IT, dan lain-lain.

Pada penelitian ini obyek yang akan diteliti adalah pihak manajemen dan anggota koperasi, pemerintah daerah dan instansi terkait di Kab. Wonogiri. Beberapa alasan pemilihan obyek penelitian ini adalah pertama, perlunya mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kedua, koperasi rukun tetangga (RT) yang dikembangkan di Kab. Wonogiri cukup berkembang, sehingga dapat menjadi contoh bagi pengembangan koperasi di tempat lain, ketiga, disinyalir masih kurangnya perhatian pihak pemerintah dan perbankan terhadap pemberdayaan peran dan fungsi koperasi RT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya di daerah. Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode survey dan interview mendalam kepada responden terpilih. Sedangkan analisis data tahun pertama dengan metode analisis deskriptif dan analisis diskriminan, sedangkan tahun kedua menggunakan analisis inferensial dengan pendekatan SEM (*Structural Equation Model*).

DAFTAR REFERENSI

- Bappenas, BPS dan UNDP. 2001. **Indonesia Human Development Report 2001 Towards a New Consensus : Democracy and Human Development in Indonesia**. www. Undp.or.id.
- Ferdinand, Agusty. 2000. **Manajemen Pemasaran Sebuah Pendekatan Strategik**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 2006. **Metoda Penelitian Manajemen**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Friedmann, J. 1992. **Empowerment: the politics of alternative development**. California: Blackwell.
- Hadar, I.A. 2006. **Hak Atas Tanah**. Kompas 15 Desember 2006.
- Hanel, Alfred. 1988. **Organisasi Koperasi**. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. **Ekonomi Koperasi**. Edisi Dua. Lembaga Penerbit UI. Jakarta.
- Hendar. 2010. **Manajemen Perusahaan Koperasi**. Edisi I. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- ICA News, No. 5/6, 1996. **Co-operative Information, Statement on the Co-operative Identity**.
- Ife, K. 1995. **Comunnity Development : Creating Community Alternatives-Vision, Analisis And Practice**. Malbourne. Longman;
- Imam Ghazali. 2004. **Model Persamaan Struktural, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Krisnamurthi, B. 1998. **Perekembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat (Desertasi)**. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kenny, S. 1999. **Developing Communities for the future : Community Development in Australia**. 2nd ed. Melbourne : Nelson ITP.
- Li Zhao, Caroline Gijssels, (2011). **Multi-stakeholder co-operatives in China: a resource mix structure approach**. Social Enterprise Journal, Vol. 7 Iss: 3, pp.259 - 279
- Muenkner, Hans. 1989. **Pengantar Hukum Koperasi, Dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-undangan Koperasi di Indonesia**. Bandung. Universitas Padjadjaran.

- P Nganwa, M Lyne & S Ferrer. 2010. **What will South Africa's new Cooperatives Act do for small producers? An analysis of three case studies in Kwa Zulu-Natal**. *Agrekon*. Volume 49, Issue 1, pages 39-55
- Pranarka, AMW dan Vidhyandika, Moeljarto. 1996. **Pemberdayaan Empowerment**). Di Dalam: **Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi**". CSIS. Jakarta.
- Plummer, J. 2000. **Municipalities and community participation : a sourcebook for capacity development**. London : Farthcan.
- Rahmat Imam Santosa. 2006. **Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota**. Tesis. IPB Bogor.
- Roopke, Jochen. 1987. **The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries, With Special Reference of Indonesia**. Marburg, German.
- Ropke, Jochen. 1992. **Rebuilding Cooperatives for A New Country (on The Future of Indonesian Cooperative)**. *Jurnal Koperasi Indonesia Tahun VII – No. 1 – 1992*. Jatinangor – Bandung. IKOPIN.
- Ropke, Jochen. 1992. **Strategik Management of Self-Help Organization**. Marburg – German.
- Ropke, Jochen. 1992. **Cooperative Entreprenship**. Marburg – German.
- _____, UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
- Setiana Lubis. 2005. **Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat**. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Suharto, E. 2005 **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosisl dan Pekerjaan Sosial**. Refina Aditama. Bandung.
- Yusof Ismail and Suhaimi Mhd Sarif (2010) **Convergence of global and traditional managers' characteristics: a case of senior management of cooperatives in Malaysia**. *Journal for International Business and Entrepreneurship Development*. Volume 5. Number 1. pp 28 – 47
- Tylor, M. 2003. **Public Policy in the Community**. New York . Palgrave Macmillan.
- Tim Crescent 2003. **Menuju Masyarakat Mandiri : Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tim Koordinasi Nasional PPK. 2002. **Pedoman Umum Program Pengembangan Kecamatan**. fase II. Jakarta.
- Wignyo Adiyoso. 2009. **Mengungkap Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan masyarakat**. Pustaka Wacana Nusantara. Surabaya.